

ABSTRAK

Skripsi dengan judul “Analisis Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 1456/ Pdt.G/2025/PA.Sby Tentang Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Dalam Perspektif Hukum Islam dan *the best interest of child*” ini di tulis oleh Fadia Erfi Faiza, NIM 1860102221029

Kata Kunci : hak asuh anak (*hadhanah*), hukum keluarga Islam, kepentingan terbaik anak, pertimbangan hakim, putusan pengadilan

Permasalahan hak asuh anak (*hadhanah*) pasca perceraian merupakan isu krusial dalam hukum keluarga Islam, terutama ketika terjadi ketegangan antara ketentuan normatif dan realitas empiris yang dihadapi para pihak. Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 1456/Pdt.G/2025/PA.Sby menjadi menarik untuk dikaji karena adanya gugatan pencabutan hak asuh anak yang sebelumnya telah diberikan kepada ibu berdasarkan putusan perceraian. Secara normatif, Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa anak yang belum *mumayyiz* berada dalam pengasuhan ibu, namun ketentuan tersebut tidak bersifat absolut apabila terbukti adanya kelalaian atau kondisi yang merugikan kepentingan anak. Fakta perkara menunjukkan adanya konflik berkepanjangan antara kedua orang tua, termasuk pembatasan akses bertemu anak, dugaan kekerasan, serta persoalan pengasuhan yang berdampak pada kondisi psikologis anak. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk menganalisis bagaimana hukum merespons dinamika tersebut dengan tetap mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak.

Penelitian ini merumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut: (1) bagaimana kronologi perkara dalam putusan tersebut; (2) bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim dalam memutus perkara hak asuh anak; dan (3) bagaimana tinjauan hukum keluarga Islam serta prinsip *the best interest of the child* terhadap putusan tersebut.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Data utama berupa putusan pengadilan dianalisis secara kualitatif dengan menelaah pertimbangan hukum hakim serta relevansinya dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan. Analisis dilakukan dengan mengkaji kesesuaian antara fakta persidangan, alat bukti, serta dasar hukum yang digunakan dalam putusan. Selain itu, penelitian ini menggunakan prinsip *the best interest of the child* sebagai kerangka analisis untuk menilai apakah putusan telah mengutamakan kesejahteraan anak secara menyeluruh. Data sekunder berupa literatur hukum, jurnal ilmiah, dan regulasi digunakan untuk memperkuat argumentasi dan validitas analisis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) kronologi perkara memperlihatkan adanya perubahan kondisi pasca putusan awal yang menjadi dasar diajukannya gugatan pencabutan hak asuh anak; (2) pertimbangan hukum majelis hakim tidak hanya berpegang pada ketentuan normatif Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, tetapi juga mempertimbangkan fakta empiris terkait kondisi pengasuhan dan kepentingan anak; dan (3) dalam tinjauan hukum keluarga Islam serta prinsip *the best interest of the child*, pengalihan hak asuh dapat dibenarkan apabila pihak yang

memegang *hadhanah* tidak memenuhi syarat atau lalai, sehingga keputusan hakim bertujuan menjamin kesejahteraan fisik, mental, dan emosional anak. Dengan demikian, putusan tersebut mencerminkan keseimbangan antara norma hukum Islam dan perlindungan hak anak sebagai pertimbangan utama dalam perkara *hadhanah*.

ABSTRACT

The thesis entitled "Analysis of Surabaya Religious Court Decision Number 1456/ Pdt.G/2025/PA.Sby Concerning Child Custody Rights After Divorce in the Perspective of Islamic Law and the Best Interest of the Child" was written by Fadia Erfi Faiza, NIM 1860102221029.

Keywords: child custody (hadhanah), Islamic family law, best interest of the child, judicial reasoning, court decision

The issue of child custody (hadhanah) following divorce constitutes a crucial matter in Islamic family law, particularly when there is tension between normative provisions and empirical realities faced by the parties. The decision of the Surabaya Religious Court Number 1456/Pdt.G/2025/PA.Sby is noteworthy due to the claim for revocation of custody previously granted to the mother based on an earlier divorce ruling. Normatively, the Compilation of Islamic Law stipulates that children who are not yet mumayyiz should be under the care of their mother; however, this provision is not absolute if there is proven neglect or circumstances detrimental to the child's welfare. The facts of the case reveal prolonged conflict between both parents, including restricted access, allegations of violence, and parenting issues affecting the children's psychological condition. Therefore, this study is essential to analyze how the law responds to such dynamics while prioritizing the best interests of the child.

This study formulates the research questions as follows: (1) what is the chronology of the case; (2) how do the judges consider legal reasoning in deciding the custody dispute; and (3) how is the decision viewed from the perspective of Islamic family law and the principle of the best interest of the child.

This research employs a normative legal method using a case approach and a conceptual approach. The primary data consist of court decisions analyzed qualitatively by examining judicial reasoning and its conformity with Islamic law and statutory regulations. The analysis focuses on the relationship between factual findings, evidentiary elements, and the legal basis applied by the judges. Additionally, the principle of the best interest of the child is used as an analytical framework to evaluate whether the decision prioritizes the child's overall welfare. Secondary data such as legal literature, academic journals, and statutory provisions are utilized to strengthen the analysis.

The findings indicate that: (1) the case chronology reflects a change in post-divorce conditions that led to the custody revocation claim; (2) the judges' legal considerations are not solely based on Article 105 of the Compilation of Islamic Law but also incorporate empirical facts concerning the child's well-being; and (3) from the perspective of Islamic family law and the principle of the best interest of the child, custody may be transferred if the custodian fails to meet the required qualifications or neglects their responsibilities, ensuring the child's physical, mental, and emotional welfare. Therefore, the decision reflects a balance between Islamic legal norms and child protection as the paramount consideration in custody disputes.